



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 107);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 107) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 132

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 107
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN PEUNDEUY
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar OPD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023, yaitu:

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.681.916.113	46,21%	777.275.423
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.162.600	57,28%	21.858.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.758.700	67,52%	5.238.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.749.800	55,30%	3.179.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.749.800	23,13%	1.330.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.749.800	77,39%	4.449.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.700.000	42,13%	1.980.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.074.500	30,25%	930.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.380.000	88,29%	4.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.321.586.731	45,32%	598.934.022
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.317.142.431	45,39%	597.894.022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.444.300	23,40%	1.040.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.395.500	62,67%	8.395.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.395.500	100,00%	8.395.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0,00%	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.584.600	60,55%	62.720.775
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.518.000	100,00%	10.518.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.045.600	57,38%	16.666.850
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.521.100	100,00%	9.521.100

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.059.800	23,65%	3.562.225
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.541.400	43,33%	1.968.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.249.900	43,30%	8.335.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	72,22%	9.100.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.048.800	100,00%	3.048.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.057.732	34,50%	49.706.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.706.200	100,00%	43.706.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.351.532	5,98%	6.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.498.950	60,44%	27.500.626
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.195.400	46,05%	6.537.076
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	60,00%	4.260.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.203.550	69,01%	16.703.550
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.630.000	52,21%	8.160.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.630.000	52,21%	8.160.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.400.000	16,38%	21.848.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	7,73%	8.502.300
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	7,73%	8.502.300
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.400.000	57,04%	13.346.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.400.000	57,04%	13.346.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.270.900	46,61%	24.365.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.270.900	42,05%	9.365.400
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.270.900	57,22%	7.020.900

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	23,45%	2.344.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	50,00%	15.000.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	50,00%	15.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.400.200	61,44%	85.645.200
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139.400.200	61,44%	85.645.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.400.000	53,97%	48.245.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.200	74,80%	37.400.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.400.000	38,66%	7.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.400.000	38,66%	7.500.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.400.000	38,66%	7.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	19,73%	2.960.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	19,73%	2.960.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000	19,73%	2.960.000
TOTAL	2.041.387.213	45,05%	919.594.823

Sumber : Perubahan RENSTRA KECAMATAN PEUNDEUY Tahun 2019-2024 dan Pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 2.041.387.213,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022

dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 919.594.823,00 atau sebesar 45,05%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 45,05% untuk target kinerja dan 45,05% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,21%	46,21%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57,28%	57,28%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67,52%	67,52%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55,30%	55,30%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23,13%	23,13%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	77,39%	77,39%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	42,13%	42,13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,25%	30,25%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,29%	88,29%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,32%	45,32%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,39%	45,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23,40%	23,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62,67%	62,67%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,00%	100,00%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,55%	60,55%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,38%	57,38%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,65%	23,65%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43,33%	43,33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43,30%	43,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,22%	72,22%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,50%	34,50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,98%	5,98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,44%	60,44%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,05%	46,05%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00%	60,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,01%	69,01%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,21%	52,21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,21%	52,21%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16,38%	16,38%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,73%	7,73%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,73%	7,73%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57,04%	57,04%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57,04%	57,04%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46,61%	46,61%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42,05%	42,05%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	57,22%	57,22%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,45%	23,45%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	50,00%	50,00%
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50,00%	50,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61,44%	61,44%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61,44%	61,44%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53,97%	53,97%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	74,80%	74,80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,66%	38,66%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38,66%	38,66%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38,66%	38,66%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,73%	19,73%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,73%	19,73%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19,73%	19,73%
TOTAL	45,05%	45,05%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.681.916.113	46,21%	777.275.423
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.162.600	57,28%	21.858.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.758.700	67,52%	5.238.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.749.800	55,30%	3.179.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.749.800	23,13%	1.330.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.749.800	77,39%	4.449.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.700.000	42,13%	1.980.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.074.500	30,25%	930.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.380.000	88,29%	4.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.321.586.731	45,32%	598.934.022
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.317.142.431	45,39%	597.894.022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.444.300	23,40%	1.040.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.395.500	62,67%	8.395.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.395.500	100,00%	8.395.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0,00%	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.584.600	60,55%	62.720.775
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.518.000	100,00%	10.518.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.045.600	57,38%	16.666.850
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.521.100	100,00%	9.521.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.059.800	23,65%	3.562.225
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.541.400	43,33%	1.968.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.249.900	43,30%	8.335.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	72,22%	9.100.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.048.800	100,00%	3.048.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.057.732	34,50%	49.706.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.706.200	100,00%	43.706.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.351.532	5,98%	6.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.498.950	60,44%	27.500.626
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.195.400	46,05%	6.537.076
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	60,00%	4.260.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.203.550	69,01%	16.703.550
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.630.000	52,21%	8.160.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.630.000	52,21%	8.160.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.400.000	16,38%	21.848.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	7,73%	8.502.300
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	7,73%	8.502.300
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.400.000	57,04%	13.346.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.400.000	57,04%	13.346.500

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.270.900	46,61%	24.365.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.270.900	42,05%	9.365.400
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.270.900	57,22%	7.020.900
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	23,45%	2.344.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	50,00%	15.000.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	50,00%	15.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.400.200	61,44%	85.645.200
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139.400.200	61,44%	85.645.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.400.000	53,97%	48.245.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.200	74,80%	37.400.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.400.000	38,66%	7.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.400.000	38,66%	7.500.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.400.000	38,66%	7.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	19,73%	2.960.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	19,73%	2.960.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000	19,73%	2.960.000
TOTAL	2.041.387.213	45,05%	919.594.823

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 45,05%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 45,05% untuk target kinerja, dan 45,05% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENJA Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,21%	46,21%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57,28%	57,28%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67,52%	67,52%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55,30%	55,30%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23,13%	23,13%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	77,39%	77,39%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	42,13%	42,13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,25%	30,25%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,29%	88,29%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,32%	45,32%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,39%	45,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23,40%	23,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62,67%	62,67%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,00%	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,55%	60,55%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,38%	57,38%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,65%	23,65%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43,33%	43,33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43,30%	43,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,22%	72,22%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,50%	34,50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,98%	5,98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,44%	60,44%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,05%	46,05%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00%	60,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,01%	69,01%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,21%	52,21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,21%	52,21%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16,38%	16,38%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,73%	7,73%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,73%	7,73%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57,04%	57,04%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57,04%	57,04%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46,61%	46,61%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42,05%	42,05%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	57,22%	57,22%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,45%	23,45%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	50,00%	50,00%
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50,00%	50,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61,44%	61,44%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61,44%	61,44%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53,97%	53,97%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	74,80%	74,80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,66%	38,66%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38,66%	38,66%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38,66%	38,66%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,73%	19,73%

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,73%	19,73%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19,73%	19,73%
TOTAL	45,05%	45,05%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Peundeuy Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Peundeuy Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Peundeuy

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN					1.745.006.621	89%		919.594.823	45,05%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	1.461.056.021	87%	100%	777.275.423	46,21%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.837.200	100%	1 Laporan	21.858.300	57,28%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.837.200	100%	1 Dokumen	5.238.700	67,52%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	3.179.800	55,30%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1.330.000	23,13%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	4.449.800	77,39%

						Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1.980.000	42,13%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	930.000	30,25%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	4.750.000	88,29%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.204.038.268	86%	1 Laporan	598.934.022	45,32%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.200.394.468	86%	17 Orang/bulan	597.894.022	45,39%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.643.800	53%	1 Laporan	1.040.000	23,40%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	8.395.500	62,67%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	-	-	24 Paket	8.395.500	100,00%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	-	0%	2 Orang	-	0,00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77.270.800	100%	1 Laporan	62.720.775	60,55%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000	100%	1 Paket	10.518.000	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	29.818.100	100%	7 Paket	16.666.850	57,38%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	-	-	5 Paket	9.521.100	100,00%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3.449.100	100%	5 Paket	3.562.225	23,65%

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.353.600	100%	6 Dokumen	1.968.000	43,33%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.320.000	100%	12 Laporan	8.335.800	43,30%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.330.000	99%	12 Laporan	9.100.000	72,22%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	3.048.800	100,00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.131.575	97%	1 Laporan	49.706.200	34,50%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	83.484.400	98%	5 Unit	43.706.200	100,00%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.400.000	100%	1 Unit	6.000.000	5,98%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.579.878	91%	1 Laporan	27.500.626	60,44%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.463.878	74%	12 Laporan	6.537.076	46,05%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.520.000	100%	12 Laporan	4.260.000	60,00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.596.000	100%	2 Laporan	16.703.550	69,01%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.198.300	76%	1 Laporan	8.160.000	52,21%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	9.198.300	76%	8 Unit	8.160.000	52,21%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	91.954.100	97%	100%	21.848.800	16,38%

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	74.082.100	96%	1 Laporan	8.502.300	7,73%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74.082.100	96%	1 Dokumen	8.502.300	7,73%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.872.000	100%	1 Laporan	13.346.500	57,04%
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17.872.000	100%	8 Dokumen	13.346.500	57,04%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100%	100%	42.236.500	100%	100%	24.365.400	46,61%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.456.500	100%	1 Laporan	9.365.400	42,05%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	33.456.500	100%	6 Desa	7.020.900	57,22%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	2.344.500	23,45%
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	15.000.000	50,00%
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	15.000.000	50,00%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%	100%	87.440.000	100%	100%	85.645.200	61,44%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	87.440.000	100%	1 Laporan	85.645.200	61,44%

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	87.440.000	100%	1 Laporan	48.245.000	53,97%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	37.400.200	74,80%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	50.000.000	100%	100%	7.500.000	38,66%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	100%	1 Laporan	7.500.000	38,66%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Wawasan dan Kebangsaan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Acara/Lainnya	6 Desa	6 Desa	6 Desa	-	-	6 Desa	7.500.000	38,66%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa berkinerja baik	100%	100%	100%	12.320.000	99%	100%	2.960.000	19,73%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.320.000	99%	1 Laporan	2.960.000	19,73%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	2.960.000	19,73%

Sumber : DPA Kec. Peundeuy, 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.041.387.213,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp. 919.594.823,00 atau mencapai 45,05%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023
sampai dengan triwulan II

Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.681.916.113	777.275.423	46,21%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.162.600	21.858.300	57,28%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.758.700	5.238.700	67,52%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.749.800	3.179.800	55,30%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.749.800	1.330.000	23,13%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.749.800	4.449.800	77,39%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.700.000	1.980.000	42,13%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.074.500	930.000	30,25%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.380.000	4.750.000	88,29%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.321.586.731	598.934.022	45,32%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.317.142.431	597.894.022	45,39%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.444.300	1.040.000	23,40%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.395.500	8.395.500	62,67%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.395.500	8.395.500	100,00%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	-	0,00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.584.600	62.720.775	60,55%

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.518.000	10.518.000	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.045.600	16.666.850	57,38%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.521.100	9.521.100	100,00%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.059.800	3.562.225	23,65%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.541.400	1.968.000	43,33%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.249.900	8.335.800	43,30%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	9.100.000	72,22%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.048.800	3.048.800	100,00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.057.732	49.706.200	34,50%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.706.200	43.706.200	100,00%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.351.532	6.000.000	5,98%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.498.950	27.500.626	60,44%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.195.400	6.537.076	46,05%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	4.260.000	60,00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.203.550	16.703.550	69,01%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.630.000	8.160.000	52,21%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.630.000	8.160.000	52,21%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.400.000	21.848.800	16,38%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	8.502.300	7,73%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.000.000	8.502.300	7,73%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.400.000	13.346.500	57,04%
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.400.000	13.346.500	57,04%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.270.900	24.365.400	46,61%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.270.900	9.365.400	42,05%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.270.900	7.020.900	57,22%

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	2.344.500	23,45%
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	15.000.000	50,00%
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	15.000.000	50,00%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.400.200	85.645.200	61,44%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139.400.200	85.645.200	61,44%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.400.000	48.245.000	53,97%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.200	37.400.200	74,80%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.400.000	7.500.000	38,66%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.400.000	7.500.000	38,66%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.400.000	7.500.000	38,66%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	2.960.000	19,73%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	2.960.000	19,73%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000	2.960.000	19,73%
TOTAL						2.041.387.213	919.594.823	45,05%

Sumber : DPA Kec. Peundeuy Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 30 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi anggaran sampai dengan TW II. Selain itu, terdapat 4 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena anggaran kas pada TW I.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan faktor atau suatu kesimpulan dari

target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Peundeuy pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Peundeuy.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas antara lain:

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten / kota)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.
								1	2					3	4	5		6				7		8			9		10	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																								
	7	1				KECAMATAN					2.041.387.213		401.172.245		518.422.578						919.594.823									
1	7	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				100 %	1.681.916.113	100%	343.372.145	100%	433.903.278					100%	777.275.423	100%	46,21 %						Kecamatan Peundeuy
	7	0	0	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Lapo ran	38.162.600	1 Lapo ran	12.669.600	1 Lapo ran	9.188.700					1 Lapo ran	21.858.300	1 Lapo ran	57,28 %						Kecamatan Peundeuy
	7	0	0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				1 Doku men	7.758.700	1 Doku men	1.120.000	1 Doku men	4.118.700					1 Doku men	5.238.700	1 Doku men	67,52 %						Kecamatan Peundeuy
	7	0	0	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Doku men	5.749.800	1 Doku men	2.149.800	1 Doku men	1.030.000					1 Doku men	3.179.800	1 Doku men	55,30 %						Kecamatan Peundeuy
	7	0	0	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Doku men	5.749.800	1 Doku men	0	1 Doku men	1.330.000					1 Doku men	1.330.000	1 Doku men	23,13 %						Kecamatan Peundeuy

7	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	5.000.000	2 Orang	0	2 Orang	0					2 Orang	-	2 Orang	0,00 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah					1 Laporan	103.584.600	1 Laporan	25.974.850	1 Laporan	36.745.925					1 Laporan	62.720.775	1 Laporan	60,55 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.					1 Paket	10.518.000	1 Paket	5.497.100	1 Paket	5.020.900					1 Paket	10.518.000	1 Paket	100,0 0%						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					7 Paket	29.045.600	7 Paket	10.599.150	7 Paket	6.067.700					7 Paket	16.666.850	7 Paket	57,38 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	9.521.100	5 Paket	0	5 Paket	9.521.100					5 Paket	9.521.100	5 Paket	100,0 0%						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	15.059.800	5 Paket	0	5 Paket	3.562.225					5 Paket	3.562.225	5 Paket	23,65 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					6 Dokumen	4.541.400	6 Dokumen	1.020.000	6 Dokumen	948.000					6 Dokumen	1.968.000	6 Dokumen	43,33 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	19.249.900	12 Laporan	5.809.800	12 Laporan	2.526.000					12 Laporan	8.335.800	12 Laporan	43,30 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	0	12 Laporan	9.100.000					12 Laporan	9.100.000	12 Laporan	72,22 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	3.048.800	1 Dokumen	3.048.800	1 Dokumen	0					1 Dokumen	3.048.800	1 Dokumen	100,0 0%						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.					1 Laporan	144.057.732	1 Laporan	49.580.000	1 Laporan	126.200					1 Laporan	49.706.200	1 Laporan	34,50 %						Kecamatan Peundeuy
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	43.706.200	5 Unit	43.580.000	5 Unit	126.200					5 Unit	43.706.200	5 Unit	100,0 0%						Kecamatan Peundeuy

	7	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	100.351.532	1 Unit	6.000.000	1 Unit	0					1 Unit	6.000.000	1 Unit	5,98 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1 Laporan	45.498.950	1 Laporan	16.611.776	1 Laporan	10.888.850					1 Laporan	27.500.626	1 Laporan	60,44 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 Laporan	14.195.400	12 Laporan	2.988.226	12 Laporan	3.548.850					12 Laporan	6.537.076	12 Laporan	46,05 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	7.100.000	12 Laporan	1.420.000	12 Laporan	2.840.000					12 Laporan	4.260.000	12 Laporan	60,00 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	24.203.550	2 Laporan	12.203.550	2 Laporan	4.500.000					2 Laporan	16.703.550	2 Laporan	69,01 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.					1 Laporan	15.630.000	1 Laporan	2.260.000	1 Laporan	5.900.000					1 Laporan	8.160.000	1 Laporan	52,21 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					8 Unit	15.630.000	8 Unit	2.260.000	8 Unit	5.900.000					8 Unit	8.160.000	8 Unit	52,21 %					Kecamatan Peundeuy
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan					100 %	133.400.000	100%	11.939.700	100%	9.909.100					100%	21.848.800	100%	16,38 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan					1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	4.396.200	1 Laporan	4.106.100					1 Laporan	8.502.300	1 Laporan	7,73 %					Kecamatan Peundeuy

	7	01	02	2021		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	4.396.200	1 Dokumen	4.106.100					1 Dokumen	8.502.300	1 Dokumen	7,73 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	02	2022		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN					1 Laporan	23.400.000	1 Laporan	7.543.500	1 Laporan	5.803.000					1 Laporan	13.346.500	1 Laporan	57,04 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	02	2022	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					8 Dokumen	23.400.000	8 Dokumen	7.543.500	8 Dokumen	5.803.000					8 Dokumen	13.346.500	8 Dokumen	57,04 %					Kecamatan Peundeuy
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan					100 %	52.270.900	100%	8.665.400	100%	15.700.000					100%	24.365.400	100%	46,61 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	03	2021		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					1 Laporan	22.270.900	1 Laporan	8.665.400	1 Laporan	700.000					1 Laporan	9.365.400	1 Laporan	42,05 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	03	2021	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6 Desa	12.270.900	6 Desa	6.670.900	6 Desa	350.000					6 Desa	7.020.900	6 Desa	57,22 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	03	2021	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.994.500	1 Laporan	350.000					1 Laporan	2.344.500	1 Laporan	23,45 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	03	2025		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	15.000.000					1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	50,00 %					Kecamatan Peundeuy

	7	01	03	205	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan					1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000					1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	50,00 %					Kecamatan Peundeuy
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum					100 %	139.400.200	100%	28.995.000	100%	56.650.200					100%	85.645.200	100%	61,44 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum					1 Laporan	139.400.200	1 Laporan	28.995.000	1 Laporan	56.650.200					1 Laporan	85.645.200	1 Laporan	61,44 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	89.400.000	1 Laporan	28.995.000	1 Laporan	19.250.000					1 Laporan	48.245.000	1 Laporan	53,97 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2 Laporan	50.000.200	2 Laporan	0	2 Laporan	37.400.200					2 Laporan	37.400.200	2 Laporan	74,80 %					Kecamatan Peundeuy
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat					100 %	19.400.000	100%	7.500.000	100%	-					100%	7.500.000	100%	38,66 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan					1 Laporan	19.400.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	-					1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	38,66 %					Kecamatan Peundeuy
	7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Wawasan dan Kebangsaan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Acara/Lainnya					6 Desa	19.400.000	6 Desa	7.500.000	6 Desa	0					6 Desa	7.500.000	6 Desa	38,66 %					Kecamatan Peundeuy

						Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa berkinerja baik					100 %	15.000.000	100%	700.000	100%	2.260.000					100%	2.960.000	100%	19,73 %				Kecamatan Peundeuy
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	700.000	1 Laporan	2.260.000					1 Laporan	2.960.000	1 Laporan	19,73 %				Kecamatan Peundeuy
	7	01	06	201	12	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	700.000	1 Dokumen	2.260.000					1 Dokumen	2.960.000	1 Dokumen	19,73 %				Kecamatan Peundeuy
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																													
Faktor penghambat:																													
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																													
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																													

Sumber: Lap. Evaluasi Renja Kec. Peundeuy, 2023

2.2.3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (Stunting)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

1. SPM Pelayanan						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	Menyusun SP, SOP, dan Kebutuhan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Pelayanan di Kecamatan	6 Desa	100%	Kasi Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. SPM Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
	Monitoring Bansos, BPNT, Pembangunan, Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan	<i>Jumlah Warga yang mendapatkan Bantuan Sosial</i>	6 Desa	100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kasi PMD	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Mengadakan bimtek terhadap Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di bimtek	6 Desa	100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

	Sosialisasi Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Sosialisasi Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan	6 Desa	100%	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. SPM Trantibum						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
	Melaksanakan koordinasi dalam rangka Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlahkoordinasi dengan Intenasi Vertikal	6 Desa	100%	Kasi trantib	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. SPM Seksi Pemerintahan						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program
1	PelaksanaanUpacara peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah warga yang mengikuti upacara hari besar nasional dalam rangka Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kali	2 Kali	Kasi Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2	Pelaksanaan Rapat koordinas dalam rangka Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat koordiasi dengan Forkopimcam	12 bulan	12 bulan	Kasi Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. SPM Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Aktifitas	Indikator	Target	Capaian	Satuan Tugas	Program

1	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK)	Usulan Kegiatan Prioritas Kec. Menurut Perangkat Daerah	6 Desa	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2	Melaksanakan Sosialisasi terhadap lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi	6 Desa	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target.

Stunting menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang,peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

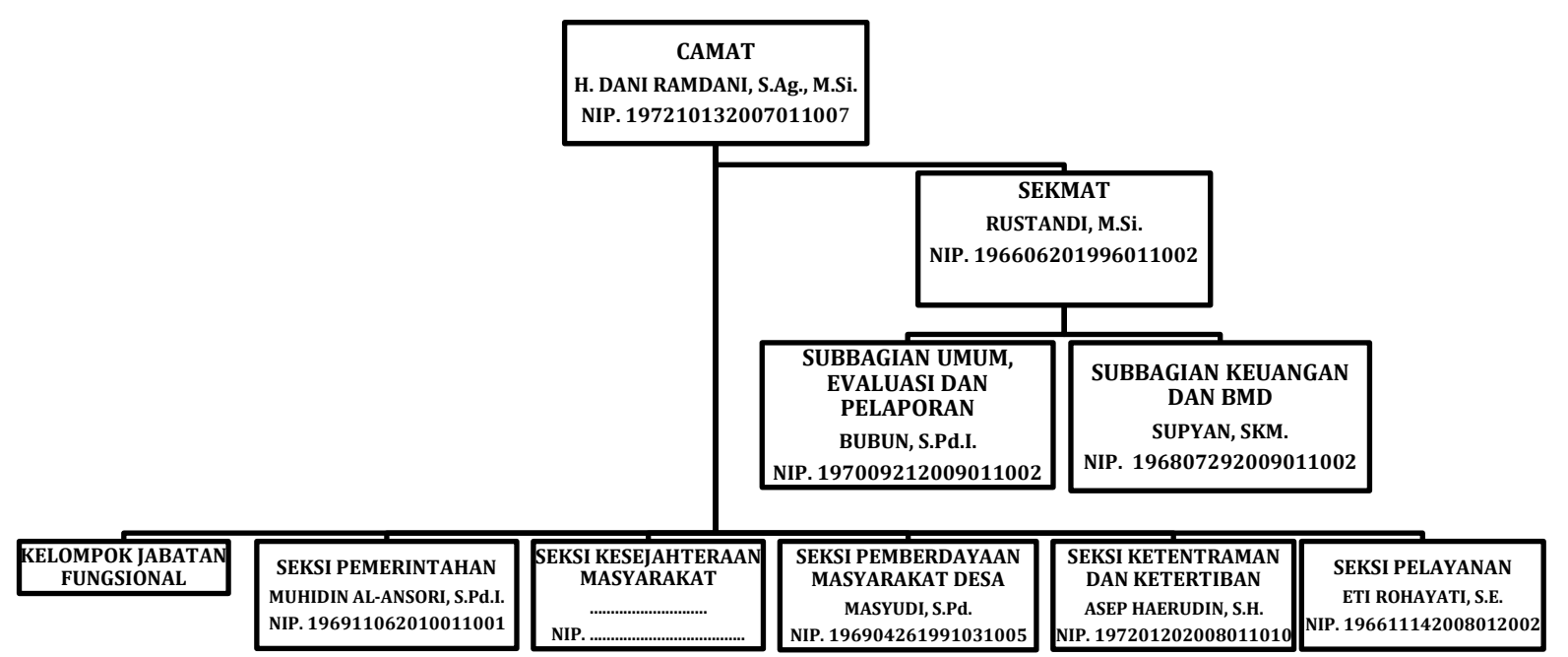
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Peundeuy sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Peundeuy. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Peundeuy berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Peundeuy



Sumber: Peraturan Bupati Garut No. 27 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebagai berikut:

- 1) Camat;
 - Camat membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan;dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- 3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;

2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa:

a. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan

umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah

- tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

- 1) Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Seksi Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- 3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 4) Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
- 5) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			79	80	81	82	79	80	81	82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			82	83	84	85	82	83	84	85	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Peundeuy, 2023

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Peundeuy bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik.
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa.
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanganan Kemiskinan Ekstrim.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya:

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
3. Penentuan Isu isu dan prioritas pembangunan sektor terkait
4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
5. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap OPD;
6. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah;
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Penanganan Stunting;
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang pendidikan politik demokrasi.

2.5 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Peundeuy disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Peundeuy serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang urusan kewilayahan.
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.573.180.581,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis

kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.573.180.581,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp.2.041.387.213,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp.19.353.776,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.022.033.437,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.3.573.180.581,00 atau bertambah Rp.1.551.147.144,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.10
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif					
7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01									6,873,025,284	2,041,387,213	3,573,180,581					4,281,251,346					
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,319,450,624	1,681,916,113	3,264,069,081				100 %	3,707,263,356				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	33,245,250	38,162,600	35,692,600				12 Bulan	80,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,220,750	7,758,700	6,638,700	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,750,000	5,749,800	5,299,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,750,000	5,749,800	5,299,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Peundeuy

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,750,000	5,749,800	5,299,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,074,500	3,074,500	3,074,500	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Laporan	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	5,380,000	5,380,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,413,489,884	1,321,586,731	1,352,018,899						12 Bulan	1,447,456,571	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,410,445,384	1,317,142,431	1,347,574,599	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	17 Orang/bulan	1,410,456,571	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,044,500	4,444,300	4,444,300	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan	Kecamatan Peundeuy	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Peundeuy

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											kinerja aparatur					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23,501,700	13,395,500	8,395,500						12 Bulan	26,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	8,501,700	8,395,500	8,395,500	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	24 Paket	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	15,000,000	5,000,000	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	2 Orang	15,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,017,900	103,584,600	98,775,400						12 Bulan	317,900,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,406,900	10,518,000	10,518,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Paket	9,900,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 7 Paket	1 Laporan 7 Paket	1 Laporan 7 Paket	1 Laporan 7 Paket	1 Laporan 7 Paket	28,186,650	29,045,600	29,009,500	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Laporan 7 Paket	110,000,000	Kecamatan Peundeuy

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan 5 Paket	1 Laporan 5 Paket	1 Laporan 5 Paket	1 Laporan 5 Paket	1 Laporan 5 Paket	4,154,050	9,521,100	9,521,100	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Laporan 5 Paket	44,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	17,858,200	15,059,800	15,059,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	5 Paket	23,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4,320,000	4,541,400	4,541,400	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	6 Dokumen	0	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19,250,000	19,249,900	14,476,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12,840,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	12 Laporan	70,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,002,100	3,048,800	3,048,800	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,691,529,400	144,057,732	1,708,057,732						12 Bulan	1,410,386,685	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14,216,760	14,195,400	14,195,400	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	11,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7,100,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7,500,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20,628,480	24,203,550	24,203,550	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	20,027,100	Kecamatan Peundeuy
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah umlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	18,721,250	15,630,000	15,630,000						12 Bulan 12 Bulan	67,193,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	18,721,250	15,630,000	15,630,000	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan	Kecamatan Peundeuy	8 Unit	17,193,000	Kecamatan Peundeuy

					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya											kinerja aparatur					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	76,475,400	133,400,000	117,118,100					100 %	146,740,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	37,934,000	110,000,000	95,191,600					12 Bulan	121,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,934,000	110,000,000	95,191,600	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	121,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38,541,400	23,400,000	21,926,500					12 Bulan	25,740,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	38,541,400	23,400,000	21,926,500	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	8 Dokumen 8 Laporan	25,740,000	Kecamatan Peundeuy

						Republik Indonesia																
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,200	0	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	12 Dokumen	140,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	64,820,000	15,000,000	6,056,600						100 %	110,450,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64,820,000	15,000,000	6,056,600						12 Bulan	110,450,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	19,838,000	0	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	6 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,440,000	15,000,000	6,056,600	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	16,500,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10,008,000	0	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Peundeuy	6 Dokumen	15,450,000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	12,374,000	0	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan	Kecamatan Peundeuy	6 Laporan	7,500,000	Kecamatan Peundeuy

						Perundang-Undangan										kinerja aparat						
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,160,000	0	0	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Peundeuy
TOTAL												6,873,025,284	2,041,387,213	3,573,180,581							4,281,251,346	

Sumber: Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Peundeuy tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Peundeuy yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan

visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa: Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada

pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu:

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan tingkat Kecamatan, serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat

Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan Peundeuy adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah, dengan indikator:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra

Perubahan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Peundeuy dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	81
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	84

Sumber: Perubahan Renstra Kecamatan Peundeuy Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Kecamatan Peundeuy	6	14	34	3.573.180.581
Total		6	14	34	3.573.180.581

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang urusan kewilayahan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Pubik
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan;
4. Jumlah subkegiatan sebanyak 34 subkegiatan;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.573.180.581,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.041.387.213,- mengalami penyesuaian sebesar

Rp.19.353.776,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2.022.033.437,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.1.551.147.144,- menjadi sebesar Rp.3.573.180.581,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.32 KECAMATAN PEUNDEUY

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
					Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target							
					Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah			
7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01			KECAMATAN												2,041,387,213	3,573,180,581			4,281,251,346		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,681,916,113	3,264,069,081			3,707,263,356		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												38,162,600	35,692,600			80,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	7,758,700	6,638,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	5,749,800	5,299,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	5,749,800	5,299,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	5,749,800	5,299,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	11,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Dokumen DPA- SKPD											Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	4,700,000	4,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 nilai	85 nilai	3,074,500	3,074,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 nilai	85 nilai	5,380,000	5,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,321,586,731	1,352,018,899			1,447,456,571			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,317,142,431	1,347,574,599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,410,456,571
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	4,444,300	4,444,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
					Akhir Tahun SKPD	Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Perangkat Daerah											Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									13,395,500	8,395,500				26,000,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	24 Paket	24 Paket	12 Bulan	12 Bulan	8,395,500	8,395,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									103,584,600	98,775,400				317,900,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	10,518,000	10,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9,900,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Laporan 7 Paket	1 Laporan 7 Paket	12 Bulan	12 Bulan	29,045,600	29,009,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	110,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum											Sesudah
							Perlengkapan Kantor yang Disediakan																		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Laporan 5 Paket	1 Laporan 5 Paket	12 Bulan	12 Bulan	9,521,100	9,521,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	44,000,000			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	12 Bulan	12 Bulan	15,059,800	15,059,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23,000,000			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	4,541,400	4,541,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	19,249,900	14,476,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	50,000,000			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12,600,000	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	70,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah		
						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan												Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3,048,800	3,048,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										144,057,732	1,708,057,732	1,410,386,685					
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	75,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	75,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	43,706,200	57,706,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	120,000,000
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																	Daerah di Tingkat Kecamatan					
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	1,550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	100,351,532	100,351,532	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	110,386,685
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										45,498,950	45,498,950			38,527,100			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	14,195,400	14,195,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7,100,000	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	7,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																	Tingkat Kecamatan					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	24,203,550	24,203,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20,027,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										15,630,000	15,630,000			67,193,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	12 Bulan	12 Bulan	15,630,000	15,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	17,193,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										133,400,000	117,118,100			146,740,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										110,000,000	95,191,600			121,000,000			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	81 Point	81 Point	110,000,000	95,191,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	121,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										23,400,000	21,926,500			25,740,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	23,400,000	21,926,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	25,740,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										52,270,900	34,791,600			95,797,990			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										22,270,900	13,791,600			24,497,990			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Desa	6 Desa	85 nilai	85 nilai	12,270,900	7,720,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	13,497,990	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	85 nilai	85 nilai	10,000,000	6,070,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										30,000,000	21,000,000			30,300,000			
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30,300,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										139,400,200	131,745,200			60,000,000			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										139,400,200	131,745,200			60,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Trantibum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 nilai	85 nilai	89,400,000	81,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Gangguan Trantibum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 % 100 %	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	85 nilai	85 nilai	50,000,200	50,000,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 % 100 %	60,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										19,400,000	19,400,000	161,000,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										19,400,000	19,400,000	161,000,000					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Desa yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamtan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Desa 0 Orang	6 Desa 0 Orang	85 nilai	85 nilai	19,400,000	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	21,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 nilai	85 nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	140,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										15,000,000	6,056,600	110,450,000					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										15,000,000	6,056,600	110,450,000					
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	85 nilai	85 nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	21,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	15,000,000	6,056,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	16,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	85 nilai	85 nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15,450,000
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	85 nilai	85 nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	7,500,000
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Peundeuy, Peundeuy	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 nilai	85 nilai	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
					Desa dengan Pihak Ketiga		Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
TOTAL												2,041,387,213	3,573,180,581				4,281,251,346			

Sumber: RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN